



KR-Istimewa

Separuh badan jalan nasional di Desa Windunegara, Wangon, Banyumas, longsor sehingga arus lalu lintas diberlakukan buka-tutup.

DIBERLAKUKAN BUKA-TUTUP ARUS LALU LINTAS Jalan Nasional Ajibarang-Wangon Longsor

BANYUMAS (KR) - Hujan deras yang mengguyur wilayah Banyumas, Rabu (3/11) sore hingga malam menyebabkan jalan nasional yang menghubungkan Ajibarang-Wangon tepatnya di Desa Windunegara Kecamatan Wangon, longsor sepanjang 15 meter. Akibatnya, hanya separuh badan jalan yang bisa dilewati kendaraan secara bergantian satu-satu.

Hingga Kamis (4/11), arus lalu lintas dari dan ke Jakarta yang melintas Jalur Ajibarang-Wangon masih diberlakukan buka tutup. Longsornya jalan nasional itu juga mengakibatkan gangguan jaringan kabel optik dan pipa PDAM, serta sejumlah rumah warga yang bermukim tepat di bawah jalan tersebut ter-

ancam. Agung (35) warga setempat menjelaskan, badan jalan itu longsor pada tengah malam. Karena derasny huj an, setengah badan jalan lon-

sor. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Proyek Jalan Nasional 1 Jawa Tengah, Yafur Sulaiman saat dikonfirmasi menga-

takan, terjadinya longsor di bagian badan jalan itu karena persis berada di daerah cekungan dan terdampak gerusan air.

"Semalam, kami dapat laporan mengenai jalan lon sor tersebut. Kami perkiraan jalan itu longsor karena gerusan air, mengingat posisi jalan itu memang rendah dan ada cekungan," jelas-

nya, Kamis (4/11).

Menurut Yafur, curah hujan yang tinggi membuat air terkonsentrasi di daerah cekungan. Padahal di lokasi itu sudah ada perkuatan tebing memakai bronjong. Untuk tindakan darurat, telah dilakukan pemasangan rambu-rambu dan arus lalu lintas diberlakukan buka tutup.

"Ada kemungkinan badan jalan yang longsor tidak hanya sepanjang 15 meter. Masih ada potensi 50 sampai 100 meter. Kami akan segera melakukan upaya perbaikan," ungkap Yafur Sulaiman. **(Dri)-d**

SUPAYA KECURANGAN MENJADI KLIR DPR Desak Seleksi Ulang CPNS

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera melakukan seleksi ulang CPNS secara menyeluruh agar masalah kecurangan menjadi klir. Junimart Girsang dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/11), menyatakan hal itu menanggapi banyaknya laporan dugaan kecurangan saat Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 di media sosial.

Hal itu ia disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Deputy Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharnan yang mengantispasi kasus masalah kecurangan, pihaknya akan melakukan diskualifikasi kepada peserta yang diketahui berbuat curang.

"Bukan diskualifikasi, ini kan ketahuan, bagaimana dengan yang lolos tidak ketahuan," kata Junimart.

Ia menilai supaya lebih fair tidak ada pilihan lain, kecuali seleksinya yang perlu diulang. "Kita khawatir ada peserta cu-

rang yang lolos dalam seleksi CPNS 2021. Jadi biar klir kita mendesak agar seleksi CPNS 2021 itu diulang secara menyeluruh. Terlepas ada atau tidaknya angaran, ini konsekuensi," ucap Junimart.

Terkait kecurangan itu, menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP ini, sejak awal Komisi II DPR telah mengingatkan Kempan RB dan BKN dalam setiap rapat kerja dengar pendapat. "Supaya dalam pelaksanaan seleksi CPNS 2021 dilakukan berbasis IT serta harus sudah mengantisipasi kemungkinan terjadi kebocoran materi soal-soal," jelasnya.

Dengan alasan sepanjang IT tersebut masih dikelola manusia tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan. Saat ini, jadi terbukti. "Jauh-jauh hari, kita di Komisi II DPR sudah mengingatkan agar peluang curang dalam seleksi CPNS 2021 ini diantisipasi. Salah satunya melalui sistem operator model digitalisasi, harusnya semua berbasis IT karena sepanjang manusia masih menjadi operator, kecurangan akan terjadi dan itu terbukti sekarang," ujar Junimart. **(Ant)-f**

CEGAH VARIAN BARU MENYEBAR ANTARNEGARA Pemeriksaan Kesehatan Pendetang Diperketat

JAKARTA (KR) - Sejumlah negara saat ini sedang mengalami lonjakan kasus Covid-19 sebagai gelombang ketiga, serta menghadapi varian baru virus penyebab Covid-19. Untuk mengantisipasi kasus serupa, Pemerintah Indonesia memperketat pemeriksaan kesehatan bagi pendatang dari luar negeri. Sejalan dengan itu, vaksinasi dan penguatan protokol kesehatan (prokes) juga tetap digencarkan apalagi menjelang liburan Natal dan tahun baru (Nataru). "Munculnya varian baru bisa melalui dua cara, yakni dibawa pelaku perjalanan dan melalui mutasi. Jadi ada dua langkah antisipasi Pemerintah untuk cegah tangkal varian baru ini," ujar Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Kamis (4/11).

Dijelaskan Nadia, pengetatan pintu masuk negara antara lain melalui kewajiban vaksin lengkap minimal 14 hari sebelum keberangkatan, tes PCR dengan hasil negatif yang diambil maksimum 3x24 jam sebelum keberangkatan, serta karantina tiga hari dimana pada hari pertama dan ketiga dilakukan entry dan exit test.

Menurut Nadia, Indonesia juga membatasi negara yang warganya bisa masuk ke Indonesia, yaitu hanya negara Level 1 dan 2 dengan tingkat positivity rate di bawah 5 persen.

Sedangkan di dalam negeri, upaya pemantauan terus dilakukan, disertai per-

cepatan vaksinasi untuk menekan virus supaya tidak berkembang lebih lanjut.

Saat ini, menurut Nadia, sudah hampir 200 juta dosis vaksin disuntikkan di Indonesia dengan cakupan sekitar 57 persen dari sasaran vaksinasi. Meski setidaknya sudah ada perlindungan, namun karena belum mencapai 70 persen, maka dinilai belum cukup untuk menahan bila ada varian baru.

Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menjelaskan, proses mutasi virus sudah berlangsung cukup lama, yang harus diperhatikan, bagaimana varian baru tidak tersebar antarnegara.

Menurutnya, mutasi adalah proses adaptasi virus ketika masuk ke tubuh inang dan akan terus terjadi sampai menuju kestabilan, melemah, atau bermutasi kembali. "Jadi yang paling harus diwaspadai adalah masuknya varian-varian pertama," ujar Masdalina.

Dicontohkan varian Delta yang memiliki tingkat penularan dan penyebaran lebih tinggi daripada varian lainnya, dimana 1 kasus dapat menularkan pada 6-8 orang. Di banyak negara, kasus varian Delta turun sendiri atau disertai intervensi masing-masing negara, setelah 8-14 minggu. Virus tersebut tidak hilang, melainkan melemah atau bermutasi lagi. **(San)-f**

DIY TUNGGU KEBIJAKAN PUSAT Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Mulai 2022

JAKARTA (KR) - Vaksinasi Covid-19 untuk anak berusia 6-11 tahun kemungkinan diberikan mulai tahun 2022. Vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun yang ditetapkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ini merupakan bentuk nyata perlindungan kepada anak yang semakin luas di tengah masih terjadinya pandemi Covid-19.

Untuk itu, orangtua diharapkan tidak ragu untuk mengizinkan anaknya mendapatkan vaksinasi, sebab anak merupakan kelompok rentan dan berisiko tinggi terhadap penularan Covid-19.

"Kami menyambut baik dan mendukung persetujuan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun. Tentu persetujuan BPOM itu setelah dilandasi uji klinis bertahap yang menunjukkan keamanan, sehingga kita semua tidak perlu ragu agar anak usia 6-11 tahun mendapatkan vaksinasi," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Kamis (4/11).

Sebelumnya, vaksinasi bagi anak usia

12-17 tahun telah berjalan sehingga proses belajar tatap muka di sekolah mulai dapat dilakukan secara bertahap.

Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (PP KIPI) Hinky Hindra Irawan Satari menyatakan, yang diterbitkan BPOM adalah izin edar daruratnya. Karena itu Pemerintah tidak serta merta memberikan vaksin Covid-19 kepada anak usia 6-11 tahun karena diperlukan banyak persiapan. Tidak hanya menyediakan stok vaksin, tapi juga kesiapan para tenaga vaksinator agar bisa menyesuaikan pemberian vaksin kepada penerima vaksin di kemudian hari.

Ketua Satgas Percepatan Vaksinasi DIY Sumadi menyatakan, Pemda DIY berharap vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun dapat segera dilakukan. Kendati demikian kelihatannya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, mengingat masih menunggu kejelasan atau instruksi dari Pemerintah Pusat sekaligus distribusi vaksin khusus anak-anak ke daerah. **(Ati/Ria/Ira)-d**

KASUS DUGAAN KORUPSI DI BANJARNEGARA PKP Minta Saksi Tak Mangkir

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau penyewaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara meminta saksi kooperatif. Hal itu disampaikan KPK karena saksi yang mangkir dari panggilan penyidik.

"Untuk itu, KPK mengimbau agar saksi kooperatif dan hadir di hadapan tim penyidik pada jadwal pemanggilan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (4/11).

Ia mengatakan demikian karena saksi atas nama Moch Rachmaudin yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, mangkir dari panggilan penyidik. Akan tetapi, KPK kembali menjadwalkan ulang pemanggilan. "Yang bersangkutan tidak hadir dan segera dilakukan penjadwalan ulang," kata Ali.

Sementara itu, saksi atas nama Hana Pur Dwiatmoko telah memenuhi panggilan lembaga antirasuah pada Rabu (3/11). Ia diperiksa tim penyidik di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijelaskan, Hana Pur Dwiatmoko diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik terkait dengan pelaksanaan lelang di Kabupaten Banjarnegara dan dugaan adanya permintaan "fee" oleh tersangka Budhi Sarwono yang merupakan Bupati Banjarnegara nonaktif.

Dalam konstruksi perkara, KPK mengatakan bahwa pada September 2017 Budhi memerintahkan Kedy memimpin rapat koordinasi yang dihadiri para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara. Pada pertemuan itu, disampaikan sebagaimana perintah dan arahan Budhi bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek. **(Ful)-f**

PODCAST PANIRADYA KAISTIMEWAN

Bahasa Jawa Pengukuh Keistimewaan DIY

BAHASA Jawa sebagai salah satu unsur dari budaya menjadi penegas/pengukuh identitas sebuah daerah, dalam hal ini Jawa. Merujuk teori relativitas bahasa, manakala satu bahasa daerah hilang maka hilanglah satu budaya di daerah tersebut.

Demikian disampaikan Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof Dr Suwarna Dwijonagoro MPd dalam Podcast Rembag Kaistimewan bertajuk 'Basa Jawi Pangukuhing Kaistimewan Ngayogyakarta'.

Podcast Rembag Kaistimewan diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewan DIY di Pendapa Wiyatapraja, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Danurejan Yogyakarta, Kamis (4/11) dan ditayangkan *live streaming* di channel You Tube Paniradya Kaistimewan DIY <https://youtube.com/c/PaniradyaKaistimewan>. Kegiatan ini didanai dengan Dana Keistimewaan.

Rembag Kaistimewan menghadirkan narasumber lain, Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan DIY Ariyanti Luhur Trisetyarini SH dan Guru SMA Negeri 1 Mlati Sleman, Abdul Afif Rosyidi SPd dipandu Ninda Fillasputri.

Prof Suwarna mencontohkan, saat seseorang menggunakan kata 'ingih', maka bisa diketahui bahwa orang tersebut berasal dari Yogya. Karena kata 'ingih' sudah menjadi identitas Yogya Istimewa. Berbeda dengan orang Surakarta yang memakai 'inggih'. "Seperti halnya Kraton Yogya, Tugu Yogya dan busana Surjan, kata 'ingih' dalam bahasa Jawa ini adalah penanda Yogya. Inilah identitas dari Yogya Istimewa," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Prof Suwarna, agar budaya Jawa, khususnya budaya Yogya tidak hilang,



KR-Devid Permana

Podcast Rembag Kaistimewan bertajuk 'Basa Jawi Pangukuhing Kaistimewan Ngayogyakarta'.

maka penggunaan bahasa Jawa Yogya perlu dilestarikan oleh masyarakat Yogya, terutama generasi milenial. Gubernur DIY Sri Sultan HB X melalui Instruksi Gubernur No 1 Tahun 2009 juga sudah menginstruksikan penggunaan Bahasa Jawa pada hari tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Provinsi DIY.

"Agar bahasa dan budaya Jawa tetap lestari, mari kita (masyarakat Yogya) gunakanlah bahasa Jawa (bisa bahasa Jawa krama hinggil atau ngoko) dalam kehidupan sehari-hari, sebisanya. Generasi milenial boleh juga memakai bahasa Jawa gaul, atau kalau belum lancar boleh dicampur dengan bahasa Indonesia. Yang penting dipraktikkan sebisanya," tuturnya.

Abdul Afif Rosyidi menuturkan, di lingkungan sekolah (dalam kasus ini di SMAN 1 Mlati), kebanyakan siswa lancar memakai bahasa Jawa ngoko dalam berkomunikasi dengan sesama temannya. Sedangkan penggunaan bahasa Jawa krama hinggil, belum semua siswa lancar. Agar masyarakat lancar berbahasa Jawa (krama hinggil), kuncinya sering digunakan/ dipraktikkan.

"Ketika siswa/anak sering mendengar bahasa Jawa krama hinggil dalam kehidupan sehari-hari, otomatis akan bisa berbahasa Jawa krama hinggil, minimal paham ketika ada orang yang mengajak bercakap memakai bahasa Jawa krama hinggil," tuturnya.

Menurut Afif, pembelajaran bahasa Jawa yang hanya memiliki porsi dua jam dalam seminggu di sekolah, masih dirasa kurang. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan penggunaan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari saat di rumah. "Kalau di rumah bapak ibunya memakai bahasa Indonesia terus, ya sulit anaknya lancar berbahasa Jawa. Maka dari itu, saya mengimbau orangtua berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa di rumah, terutama bahasa Jawa krama hinggil. Jangan takut salah berbahasa Jawa krama hinggil, karena untuk bisa lancar harus dipraktikkan sehari-hari," katanya.

Ariyanti Luhur Trisetyarini SH mengatakan, bahasa daerah sebagai sebuah entitas dalam tatanan kebangsaan, telah menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 Ayat (2)

yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 tersebut bahwa bahasa daerah merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang harus dihormati, dijaga, dilestarikan, dilindungi, dan juga dikembangkan. Pasal tersebut menunjukkan bahwa bahasa daerah memiliki kedudukan yang tinggi dalam budaya nasional. Bahasa daerah menjadi identitas diri, kebanggaan, dan cara berkomunikasi masyarakat di wilayah tertentu.

Menurutnya, Paniradya Kaistimewan DIY menyambut baik inisiasi dari Prof Suwarna yang sedang menyusun buku Pawira (Pandum Wicara Bahasa Jawa) yang bisa menjadi panduan bagi masyarakat dalam berbahasa Jawa dengan mudah (gampang). Bahasa Jawa akan mencetak generasi muda yang mempunyai rasa. "Ketika kita menyampaikan sesuatu deselingi dengan Bahasa Jawa krama hinggil akan terasa berbeda, karena ada rasa lebih menghormati lawan bicara. Mari kita mulai membiasakan berbahasa Jawa. Berbahasa Jawa itu tidak sulit," katanya. **(Dev)-f**